

Proses Perencanaan Pembangunan Harus Melibatkan Masyarakat



Perencanaan anggaran belanja daerah menggunakan pola pendekatan kinerja yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing – masing unit kerja agar mencapai hasil optimal, seperti yang terdapat pada kepmendagri nomor 13 tahun 2016. Hal itu dikatakan Bupati Barsel H. Eddy Raya Samsuri ST Jumat (27/9).

Bupati mengatakan, sangat diperlukan partisipasi masyarakat melalui jaringan aspirasi untuk menjangkau kepentingan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang lebih obyektif, dan langsung memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga manfaat dan nilai tambah dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah.

Ia mengungkapkan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa atau kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan, tentunya untuk mengatasi permasalahan desa dan kelurahan serta pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah guna menyetujui rencana kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

“Dengan hasil kesepakatan itu maka akan ada daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa yang bersangkutan yang akan di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) serta swadaya gotong royong masyarakat desa,”terangnya.